

**Elektabilitas Calon Legislatif DPRD Dapil I Provinsi Jawa Tengah Pada  
Pemilu Legislatif 2014**

(Dilihat Dari Perspektif Pandangan Pemilih)

Oleh:

Bre Ikrajendra

(14010110120089)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

*Abstract*

**Electability can be sized for the participants in the legislative election strategy to do to win elections more effectively and efficiently. The current electability becomes the most important factor for political parties and candidates in the competition for seats in parliament. Electability is measured by how much of a political party or candidates chosen by voters, but in determining the choice voters will have their own perception and assessment against a political party or candidate. Political culture , the level of political participation and voting behavior be the determining factor of a political party or candidate shall be elected by the voters or even not selected. So that voters become a major actor in the legislative elections. Purpose of this study was to determine and describe electability political parties and candidates in the Central Java provincial assembly constituency 1 (Unggaran , Kendal , Semarang and Salatiga) for the legislative elections of 2014 (viewed from the perspective of voters view). Sampling method in this study using a multistage random sampling with a sample of 400 respondents consisting of the voters who have registered as voters for the legislative elections of 2014 remain. The analysis technique used in this study is a descriptive analysis , frequencies analysis and crosstab analysis. The result show that the public has an ideal candidate criteria based perspective view of voters and political parties electability is not directly proportional to the electability candidates.**

**Keyword : Electability, legislative election, political party, candidates, voters or respondent, perception, political culture, participation and voting behavior**

## A. PENDAHULUAN

Pemilu legislatif pada hari Minggu 9 April 2014 yang akan datang merupakan peristiwa politik yang patut kita perhatikan. Bagi kalangan masyarakat biasa, pemilu legislatif sering dimaknakan sebagai ajang, dimana para calon legislatif dari partai dan *background* apapun berebut simpati dan membuka pintu rumahnya untuk menerima kedatangan warganya, menghamburkan uang demi menarik perhatian dan mencitrakan diri sebaik mungkin. Sedang bagi pimpinan parpol, peristiwa Pemilu legislaif merupakan kesempatan untuk melakukan rekrutmen politik dengan cara membuka pendaftaran bakal calon, rapat atau konvensi partai, “*fit and proper test*” hingga penentuan calon legislatif dan nomor urut calon karena pemilu sekarang ini menggunakan sistem proporsional terbuka dimana pemilih dihadapkan pada kewajiban untuk memilih partai politik dan nama caleg atau nomor caleg. Bagi calon legislatif, pemilu legislatif adalah ajang, media dan sarana untuk memperebutkan simpati dan suara masyarakat-pemilih. Itu artinya, Pemilu legislatif 2014 merupakan model seleksi wakil rakyat yang terbuka, demokratis dan melibatkan masyarakat luas dalam menentukan model atau figur kepemimpinan dan wakil rakyat pada 5 tahun yang akan datang. Pemilu legislatif 2014 ini diharapkan mampu meningkatkan hubungan yang dekat antara masyarakat-pemilih dengan calon wakilnya nanti. Wakil atau calon legislatif yang terpilih diharapkan akan mengingat dan terikat pada pemilih yang memberikan dukungan, sehingga calon yang terpilih tidak hanya memposisikan diri sebagai kelompok yang “*trustee*” tetapi juga “*delegate*” yaitu berusaha memenuhi janjinya dan menjalankan kepentingan-kepentingan pemilihnya.

Secara teoritis, kajian tentang pemilu langsung dalam tingkat lembaga legislatif (pileg) memang menarik. Secara normatif diadakannya pileg langsung karena adanya perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup dimana calon legislatif dipilih oleh intern partai menjadi proporsional terbuka dimana masyarakat yang kini menentukan siapa calon yang berhak menjadi anggota legislatif. Bersamaan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka terjadilah perubahan Undang-Undang Tentang Pemilu, dengan demikian, dampak politis lahirnya penetapan pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka adalah terjadinya penguatan dalam pelaksanaan Demokrasi di masyarakat. Masuknya aktor baru yaitu masyarakat pemilih sebagai salah satu aktor penting dalam terpilihnya calon legislatif diharapkan dapat memperkuat bangunan demokrasi, secara Nasional calon atau wakil rakyat yang dipilih adalah orang-orang yang memang benar-benar bisa mewakili dan menyambung aspirasi masyarakat secara luas.

Pemilu legislatif 2014 merupakan ajang pemilihan yang paling patut untuk diperhatikan secara intensif karena pilihan masyarakat menjadi berlipat-lipat ganda karena bukan hanya partai saja yang mereka pilih melainkan juga calon legislatif yang mereka anggap pantas mewakili. Persaingan bukan lagi berdasarkan partai namun antar calon legislatif antar partai maupun satu partai sendiri. Pemilu legislatif pada dapil I provinsi Jateng patut diperhatikan karena lumbung suara di dapil I Jateng ini begitu dinamis selain peta politik yang berubah-ubah yang dikarenakan rata-rata masyarakatnya adalah kelas menengah yang perilaku politiknya tidak mudah ditebak. Pemilu legislatif 2014 layak

dicermati, yaitu masuknya masyarakat-pemilih sebagai aktor penting dalam Pemilu Legislatif 2014. Dalam perkembangannya survey perilaku memilih telah dikembangkan dalam bentuk yang bermacam-macam hingga pada akhirnya survey mengenai elektabilitas mulai gencar dilakukan. Survey elektabilitas ini sendiri adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk memahami dan melihat apakah calon atau parpol memiliki tingkat dipilih yang tinggi atau tidak. Karena pada dasarnya elektabilitas ini diawali melalui perilaku memilih masyarakat itu sendiri dan bagaimana partisipasi masyarakat. Sehingga survey elektabilitas ini menjadi penting untuk dikaji karena dapat digunakan sebagai pemahaman apakah seseorang calon atau parpol dikatakan elektabel atau tidak.

### **Daerah Pemilihan I (Dapil I) Provinsi Jawa Tengah, Pembagian Wilayah Dapil I Jawa Tengah**

Daerah Pemilihan I Jawa Tengah adalah salah satu dari 10 pembagian gugus dapil berdasarkan keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. Dapil I sendiri terdiri dari Salatiga, Semarang (Kota), Semarang (Ungaran) dan Kendal. Dapil I adalah dapil yang penting karena dapil I adalah wilayah yang merupakan pusat pemerintahan di Jawa Tengah selain memang kota besar, Wilayah administratif provinsi Jawa Tengah dijalankan di Semarang. Selain itu masyarakat di dapil I memiliki ciri khas masyarakat perkotaan dimana pada dasarnya wilayah perkotaan dihuni oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Selain itu masyarakat perkotaan memiliki budaya politik yang cukup aktif sebagai rata-rata masyarakat merupakan kelas menengah. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kantor-kantor pusat di daerah pemilihan I. Di samping itu dapil I

adalah dapil yang memang paling dekat dan berada di wilayah administratif Jawa Tengah. Sehingga bisa dikatakan masyarakat di dapil I adalah masyarakat yang paling mampu memantau perkembangan dinamika politik secara lebih dekat. Selain itu pula masyarakat dapil I adalah masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kinerja anggota DPRD maupun gubernur. Sehingga dapil I merupakan salah satu dapil terpenting di Jawa Tengah. **Pembagian Wilayah di Dapil I :**

**Gambar 2.3** Peta Dapil I Jawa Tengah



## Peta Politik di Dapil I Jawa Tengah

Dapil Jateng I menjadi momok bagi persaingan politik pada Pemilu Legislatif. Hal ini dapat dilihat karena dapil I adalah dapil yang dinamis dengan corak masyarakat perkotaan yang bercampur dengan masyarakat tradisional. Perolehan tertinggi bagi anggota DPRD Jateng berada di dapil I yaitu H.Murdoko sebanyak 110.982 pemilih yang kemudian menjadi ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena H.Murdoko merupakan ketua DPD PDIP provinsi Jawa Tengah pada saat itu. Ini yang menarik karena terjadi perbedaan suara yang sangat mencolok di tubuh PDI Perjuangan, dari 11 kursi yang diperebutkan PDI Perjuangan memperoleh 2 kursi yaitu H.Murdoko dan Rr.Maria Tri Mangesti. Namun keduanya memperoleh suara yang terpaut sangat jauh Rr.Maria Tri Mangesti hanya memperoleh 26.849 suara dibandingkan H.Murdoko yang memperoleh 110.982 suara. Bahkan suara Rr.Maria Tri Mangesti ini kalah dengan Yoyok Sukawi yang merupakan anak Sukawi Sutarip yang memperoleh suara sebanyak 54.338 suara dan Rr. Tri.Maria Pangesti merupakan 3 terbawah dari 11 kursi yang diperebutkan. Hal ini seakan terjadi ketimpangan di tubuh PDI Perjuangan untuk pileg 2009.

**Tabel 1.** Daftar Caleg Terpilih Dapil Jateng I

NO.	PARTAI POLITIK	NO.URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(5) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	Ir.H. MOCHAMAD WASIMAN	12,880	I
2	(8) PARTAI Keadilan Sejahtera	1	ARIF AWALUDIN, SH, M.Hum	30,166	I
3	(9) PARTAI AMANAT NASIONAL	1	KHAFID SIROTUDIN, SE	28,040	I
4	(12) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	KH.SYAMSUL MA'ARIF, SH	25,472	I
5	(23) PARTAI GOLONGAN KARYA	2	SASMITO	27,301	I
6	(24) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Drs. ALFASADUN, MM. Akt	18,019	I
7	(28) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	H. MURDOKO, SH	110,982	I
8		2	Rr. MARIA TRI MANGESTI, SE	26,849	II
9	(31) PARTAI DEMOKRAT	12	A.S SUKAWIJAYA, SE ALIAS YOYOK SUKAWI	54,338	I
10		1	Ir. ATYOSO MOCHTAR, SS	45,533	II

Sumber data: KPU Provinsi Jawa Tengah, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi Partai Politik Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi, 19 Mei 2009

## B. PEMBAHASAN

### Analisis Elektabilitas Partai Politik, Calon Legislatif dan Perubahan Pilihan Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2009 ke 2014

Berdasarkan Survey yang dilakukan di daerah pemilihan I Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kota Salatiga) diketahui PDIP, GOLKAR dan GERINDRA adalah partai politik yang akan menguasai 3 besar perolehan suara di dapil I. Hal ini dikarenakan ketiganya memiliki Elektabilitas yang cukup tinggi.

**Tabel 2 Elektabilitas Partai Politik**

NO	PARTAI POLITIK	ELEKTABILITAS
1	PDIP	30,3 %
2	GOLKAR	15,5 %
3	GERINDRA	10 %
4	DEMOKRAT	7,8 %
5	NASDEM	7,3 %
6	HANURA	7 %
7	PKB	5 %
8	PKS	3,5 %
9	PPP	2,5 %
10	PAN	1,3 %
11	PBB	0,8 %
12	PKPI	0,8 %

Sumber Data : Data Primer yang Diolah 2014

Berdasarkan tabel di atas, ada tiga (3) hal penting untuk menjelaskan fenomena tingginya elektabilitas PDIP di dapil I Jawa Tengah yang mencapai 30,3%. **Pertama**, Identitas partai atau Ideologi partai yang menjadi corak tersendiri bagi PDIP. Identitas PDIP yang sejak tahun 2009 memiliki tagline partai "wong cilik" nampaknya menjadikan PDIP sebagai partai yang paling

banyak diminati oleh masyarakat Jawa Tengah yang mayoritas berpenghasilan dibawah UMP yaitu dibawah 1juta. Selain itu, PDIP dikenal sebagai partai Nasionalis dan Tradisional sehingga cukup menjadi perhatian bagi masyarakat campuran desa perkotaan, utamanya bagi masyarakat desa. Bukan berarti dengan identitas partai sebagai partai yang Nasionalis dan Tradisional membuat PDIP hanya mampu menggaet suara bagi masyarakat desa dan yang cenderung plural. Namun PDIP juga mampu menggaet suara masyarakat Islam, lihat tabel 3.52. Hal ini mungkin dikarenakan partai ini memiliki baitul muslimin, organisasi sayap partai PDIP yang berkonsentrasi pada kegiatan agama. Sehingga PDIP mampu menggaet masyarakat beragama Islam. Keberhasilan elit partai menjadikan PDIP sebagai partai Nasionalis dan juga religius secara tidak langsung mampu merubah paradigma masyarakat yang menganggap bahwa PDIP adalah partai yang plural bahkan sekuler. Partai Golkar yang berada diperingkat kedua memiliki elektabilitas yang cukup tinggi yaitu sebesar 15,5 % namun cenderung statis atau tidak berubah dikarenakan partai Golkar adalah partai lama yang memiliki pendukung loyal tersendiri, terutama dikalangan masyarakat perkotaan. Partai Gerindra, Nasdem dan Hanura adalah partai yang memiliki kecenderungan peningkatan suara yang cukup signifikan. Sedangkan suara partai-partai Islam seperti PPP, PKB dan PKS cenderung menurun dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai bernaftaskan Islam mulai menurun. Partai demokrat adalah partai yang elektabilitasnya cenderung merosot tajam. Hal ini diakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai Demokrat yang menurun drastis akibat kasus korupsi yang menjerat partai ini. Walaupun ada perbedaan



antara dapil I dengan skala Nasional, namun masyarakat tetap menilai partai Demokrat secara umum.

**Kedua**, Figur atau Ketokohan, munculnya tokoh-tokoh atau kader spesial yang muncul dari PDIP membuat partai ini cenderung dipilih oleh masyarakat. Masyarakat menilai partai politik secara Nasional dan menggeneralisir bahwa pusat dan daerah cenderung sama. Tokoh memiliki kemungkinan untuk menjadi magnet penarik massa pemilih partai dan bahkan membentuk identitas partai itu tadi. Munculnya kader-kader terbaik PDIP seperti Jokowi (Gubernur DKI Jakarta), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) dan Tri Risma (Walikota Surabaya) serta tokoh lain seperti Puan Maharani dan Rieke Dyah Pitaloka mempengaruhi pemilih untuk memilih PDIP. Figur-figur ini dinilai memiliki kapabilitas, kompetensi, integritas, ketegasan, empati dan kesukaan, lihat tabel 3.17, 3.18 dan 3.19. Sehingga figur tersebut dikatakan mampu mewakili masyarakat. Dari semua tokoh tersebut ditambah Megawati Soekarno Putri yang merupakan keturunan langsung Presiden pertama RI Soekarno membuat PDIP cenderung dipilih oleh masyarakat yang rindu akan keberadaan Soekarno. Figur juga yang menyebabkan suara Golkar tidak terkontrol naik, hal ini disebabkan partai ini menjadikan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Capres tunggal, ketidaksukaan masyarakat terhadap sosok Ical membuat partai Golkar cenderung statis. Gerindra, Nasdem dan Hanura memiliki kecenderungan peningkatan suara yang signifikan juga tidak terlepas dari tokoh yang ada dalam partai seperti Prabowo, Wiranto maupun Surya Paloh. Partai Demokrat cenderung memiliki elektabilitas yang rendah dikarenakan banyaknya tokoh partai yang terlibat kasus korupsi seperti Andi Malarangeng,

Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Nazaruddin. Hal ini tidak lepas dari pengaruh media terutama televisi dalam memberikan pemberitaan mengenai baik buruknya partai politik dan tokoh-tokoh tersebut.

**Media menjadi hal ketiga** untuk menjelaskan fenomena melonjaknya suara PDIP. Media televisi menjadi pengaruh terbesar terhadap elektabilitas suara partai. Contohnya pemberitaan mengenai kinerja SBY-Boediono yang jauh dari kata baik, pemberitaan mengenai kepemimpinan Jokowi, Ganjar Pranowo maupun Tri Risma dan bagaimana kasus korupsi yang sering diberitakan oleh media televisi mampu membuat masyarakat beropini terhadap partai politik dibelakangnya.

### **Elektabilitas Caleg Partai Politik**

Kesimpulannya Identitas partai, figur dan media menjadi hal penting dalam mempengaruhi elektabilitas partai politik. Namun ada hal yang membuat tingkat elektabilitas PDIP yang tinggi menjadi ironis yaitu tidak banyak masyarakat yang mengenal caleg yang terdaftar. Bahkan masyarakat cenderung bingung caleg-caleg tersebut untuk DPRD atau DPR RI. Sehingga bisa dikatakan elektabilitas Caleg tidak terhitung tinggi namun PDIP diuntungkan karena partai politik ini memiliki elektabilitas yang tinggi, begitu pula dengan Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura, PKB dan PKS yang memiliki elektabilitas diatas 3,5 % yang merupakan ambang batas parlemen.

## Perubahan Pilihan Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2009 ke 2014

Dari Tabel dibawah dapat diketahui bahwa Responden yang memiliki afiliasi kepartaian pada pemilu legislatif 2009 yaitu, PDIP, Golkar, PAN, PKS, Gerindra dan Hanura konsisten tetap memilih partai yang sama untuk Pemilu 2014. Hal ini menandakan bahwa keenam partai tersebut memiliki basis massa yang loyal di daerah pemilihan I Jawa Tengah. Responden yang berafiliasi pada PPP, PKB dan Demokrat nampaknya mengalami perubahan pilihan partai politik untuk pemilu 2014 terutama bagi Partai Demokrat, responden yang mengaku berafiliasi pada partai Demokrat memiliki kecenderungan untuk mengganti pilihannya, pada partai lain seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan Hanura. Fenomena unik terjadi pada responden yang pada tahun 2009 belum memiliki hak pilih. Pada pemilu 2014 ini responden tersebut cenderung memilih partai Nasdem atau Nasional Demokrat dibandingkan PBB dan PKPI yang merupakan partai lama. Hal ini dikarenakan Nasdem dinilai sebagai partai baru yang dianggap masih bersih dan pro perubahan, masih bersih dari korupsi dan belum tercampur aduk dengan kepentingan politik penguasa.

Tabel 3 Afiliasi Kepartaian Responden Tahun 2009 dan Partai yang Dipilih Responden Tahun 2014

AFILIASI KEPARTAIAN	PARTAI YANG DIPILIH													Total (%)
	PDIP (%)	GOLK AR (%)	PPP (%)	PKB (%)	DEMO KRAT (%)	PAN (%)	PKS (%)	GERIN DRA (%)	HANU RA (%)	NAS DEM (%)	PBB (%)	PKPI (%)	BELUM ADA PILIHAN (%)	
PDIP	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
GOLKAR	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
PPP	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	8,3%	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
PKB	0,0	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
DEMOKRAT	22,3	6,9	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	26,9	7,7	0,0	0,0	0,0	12,3	100,0
PAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
PKS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
GERINDRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
HANURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
LAINNYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
BELUM PUNYA HAK PILIH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	20,0	44,6	4,6	4,6	24,6	100,0
Rata-rata	30,3	15,5	2,5	5,0	7,8	1,3	3,5	10,0	7,0	7,3	0,8	0,8	8,5	100,0

Sumber Data : Data Primer yang Diolah, 2014

## **C. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada pilihan partai politik masyarakat dapil I Jawa Tengah untuk pemilu legislatif DPRD 2014. Elektabilitas PDIP adalah yang tertinggi. Dengan tingkat keperpilihan sebesar 30,3 % maka PDIP akan memenangkan pemilu legislatif DPRD Jateng di Dapil I Jawa Tengah. Tingkat elektabilitas PDIP yang tinggi diakarenakan Jawa Tengah adalah salah satu basis PDIP terbesar selain di Bali. PDIP memiliki identitas partai Nasionalis yang tradisional sehingga mampu meraup suara yang tinggi bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya dapil I. Namun bukan berarti PDIP hanya populer dikalangan masyarakat tradisional atau pedesaan saja. Dibentuknya baitul muslimin yang merupakan sayap partai PDIP membuat PDIP mampu meraup suara dari kalangan santri atau golongan masyarakat yang religius. Disisi lain tingginya elektabilitas PDIP dikarenakan faktor figur atau tokoh yang muali mencuat dari PDIP seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo. Kedua tokoh tersebut menjadi magnet penarik yang cukup kuat bagi peningkatan suara PDIP. Pilgub pada tahun 2013 dimana Ganjar-Heru meraup suara sebesar 49% berbanding lurus dengan suara PDIP yang melonjak tinggi pada pemilu legislatif 2014 nanti. Namun Elektabilitas PDIP yang tinggi di dapil I. Partai lain yang memiliki Elektabilitas lain diantaranya adalah Golkar (15,5%), Gerindra (10%), Demokrat (7,8%), Nasdem (7,3%) dan Hanura (7%). Pada pemilu legislatif 2014 ini partai-partai Islam seperti PKB (5%), PKS (3,5%) dan PPP (2,5%) cenderung tidak populer.

Kesamaan agama memang menjadi pertimbangan dalam memilih namun identitas partai yang diusung nampaknya tidak sejalan dengan kondisi partai politik bernafaskan Islam yang terpuruk seperti PKB dengan persoalan internalnya dan PKS dengan kasus korupsi yang menjerat elit partainya. Penilaian masyarakat yang menganggap bahwa partai Islam adalah partai yang baik menjadi berubah dan menyamakan dengan partai Nasionalis dan partai lain membuat suara partai-partai Islam cenderung menurun. Partai lain seperti PAN, PBB dan PKPI memiliki elektabilitas yang rendah dikarenakan tiga partai tersebut tidak terlalu populer dikalangan masyarakat dahil I Jawa Tengah. Partai Demokrat adalah partai yang tingkat keterpilihannya menurun drastis dibandingkan dengan partai-partai lain.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Almond. Gabriel, Sidney Verba, *Budaya Politik tingkah laku politik dan demokrasi di lima Negara*, Jakarta, Bumi Aksara 1990 – Penerjemah : Drs. Sahat Simamora hal 16
- Gaffar. Afan, *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Belajar Offset 2004 hal 99
- Mujani. Saiful, R William Liddle, Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat “Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Bandung, Mizan Publika (Anggota IKAPI) 2012 hal 86
- Surbakti. Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, 1992 hal 145
- Walgito. Bimo, *Pengantar Psikologi Umum Edisi 3*, Yogyakarta, ANDI, 1992 hal 69

### Hasil Olahan Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Analisis Tabulasi Silang (Crosstab) antara identitas responden dengan kriteria caleg ideal.
3. Analisis Crostab Afiliasi Parpol dan Pilihan Parpol
4. Hasil Olah Data Analisis Deskriptif dan Frekuensi